

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KOTA DI-NTB

[Analysis of Regional Taxes and Transfer Revenues on The Human Development Index of Districts and Cities in NTB]

Gilang Andriansyah^{1)*}, Ofhi Sabriana²⁾, Shafira Al-Maida³⁾, Suparlan⁴⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

¹⁾*gilangandriansyah2003@gmail.com (corresponding)* , ²⁾*ofhisabriana@gmail.com*,
³⁾*shafiraalmaida82@gmail.com* , ⁴⁾*suparlan23@staff.unram.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana pajak daerah dan pendapatan transfer mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini bersifat kuantitatif dan eksploratif. Data sekunder yang digunakan adalah data panel dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB dari tahun 2019–2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pendapatan transfer berpengaruh negatif dan signifikan. Pajak daerah dan pendapatan transfer juga berdampak pada IPM. Menurut koefisien determinasi, pajak daerah dan pendapatan transfer menjelaskan 30,4% variasi IPM, sedangkan faktor-faktor lain berada di luar model. Data ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan meningkatkan pembangunan manusia, sementara ketergantungan yang signifikan pada pendapatan transfer tanpa pengelolaan yang baik dapat menurunkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membentuk strategi fiskal daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Pendapatan Transfer; Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

This study examines how regional taxes and transfer revenues affect West Nusa Tenggara (NTB) districts/cities' HDIs. This study is quantitative and explanatory. The secondary data used are panel data from 10 NTB Province districts/cities from 2019–2024. Multiple linear regression with SPSS is employed for analysis. Regional taxes somewhat positively and significantly affect the HDI, while transfer revenues negatively and significantly affect it. Regional taxes and transfer income also impact HDI. According to the coefficient of determination, regional taxes and transfer revenues explain 30.4% of HDI variation, whereas other factors fall outside the model. These data suggest that optimising regional taxes might boost fiscal capacity and increase human development, while significant dependence on transfer revenues without good management may decrease it. This research should help shape regional fiscal strategies that improve community welfare.

Keyword: Regional Tax; Transfer Revenue; Human Development Index

PENDAHULUAN

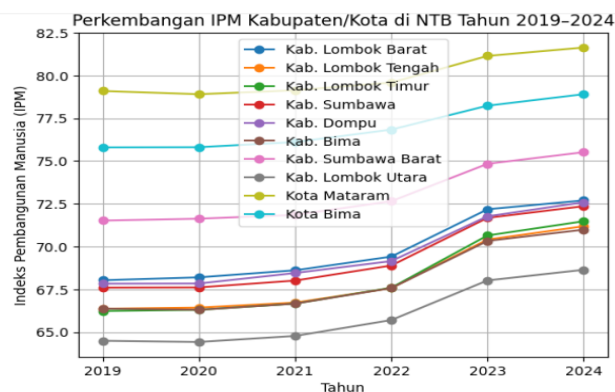
Pembangunan regional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. HDI merupakan indikator kunci keberhasilan pembangunan ini. Pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup diukur dengan HDI. Dengan demikian, kebijakan pembangunan nasional dan regional memprioritaskan peningkatan HDI. Otonomi regional memberikan pemerintah daerah kendali lebih besar atas sumber daya keuangan untuk pembangunan manusia. Dengan kekuatan fiskal, daerah harus menciptakan dan mengelola pendapatan daerah

(PAD), terutama pajak daerah, dan menggunakan transfer pendapatan pemerintah pusat secara efisien, menurut Febrianti, L (2025). Keberhasilan keuangan regional yang kuat seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pajak daerah mencerminkan kemandirian fiskal regional sebagai komponen utama pendapatan daerah (PAD). Pajak daerah mendanai layanan penting termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menurut teori keuangan publik. Pendapatan pajak menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan manusia yang meningkatkan HDI (Fernandes et al., 2022).

Bersama dengan pajak daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat sangat penting bagi keuangan regional. Transfer pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengurangi ketimpangan fiskal dan memastikan layanan publik minimal. Transfer fiskal membantu daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut teori fiskal (Suhyanto et al., 2017).

Karakteristik regional dan tingkat pembangunan bervariasi di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena potensi ekonomi, basis pajak, dan transfer pendapatan, setiap daerah memiliki kemampuan anggaran yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di NTB memiliki skor HDI yang berbeda, yang mencerminkan pembangunan manusia yang berbeda. Peningkatan pengeluaran pajak daerah dan transfer pendapatan seharusnya meningkatkan HDI karena menargetkan bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Teori pengeluaran publik menyatakan bahwa alokasi anggaran pemerintah yang tepat sasaran dapat meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (Suparlan et al., 2025).



Gambar 1: BPS NTB,2025

Peningkatan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mungkin tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak daerah dan transfer pendapatan. Manajemen anggaran yang tidak efektif, alokasi pengeluaran, dan administrasi daerah dapat menyebabkan hal ini. Oleh karena itu, penelitian empiris diperlukan untuk memahami bagaimana pajak daerah dan transfer pendapatan memengaruhi IPM (Herdian et al., 2025).

Karena mencakup periode sebelum, selama, dan setelah COVID-19, tahun 2019–2024 cocok untuk analisis. Aktivitas ekonomi menurunkan penerimaan pajak daerah dan alokasi ulang anggaran untuk tantangan kesehatan dan ekonomi selama pandemi. Hal ini dapat menurunkan kemampuan IPM distrik/kota. Dengan demikian, menganalisis data perpajakan dan transfer daerah yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat penting untuk memahami bagaimana kemampuan fisik suatu daerah dapat mendukung pertumbuhan manusia selama krisis (Isnaini et al., 2024).

Pengaruh pajak daerah dan transfer pendapatan terhadap IPM harus dipelajari untuk menentukan seberapa baik kebijakan fiskal daerah meningkatkan pembangunan manusia. Studi ini akan menjelaskan bagaimana kemampuan fiskal daerah mempengaruhi HDI, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang masih berjuang dengan pembangunan manusia. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan studi ini untuk membuat kebijakan pendapatan dan pengeluaran. Memahami variabel fiskal mana yang mendominasi HDI membantu pemerintah daerah menetapkan rencana pengelolaan anggaran yang memprioritaskan pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang ini, studi tentang pengaruh pajak daerah dan transfer pendapatan terhadap HDI kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat penting. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi intelektual dan praktis.

Pertanyaan penelitian dapat diturunkan dari uraian di atas: 1) Apakah pajak daerah mempengaruhi HDI kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 2) Apakah pendapatan transfer mempengaruhi HDI kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 3) Apakah pajak daerah dan pendapatan transfer mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (HDI) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguji bagaimana pajak daerah dan pendapatan transfer mempengaruhi HDI. Data panel sekunder deret waktu (2019–2024) dan lintas sektoral (lembaga/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat) digunakan. SPSS digunakan untuk regresi linier berganda.

Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini mengkaji Pajak Daerah, Pendapatan Transfer, dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini mengkaji pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.

Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sugiyono (2013) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari makalah, arsip, laporan pemerintah, buku, jurnal, dan publikasi lainnya. Jurnal, buku, laporan lembaga, dan data statistik pemerintah adalah contoh data sekunder. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (RPT) dari setiap kabupaten/kota untuk memperoleh data Pendapatan Pajak Daerah dan Transfer, data Indeks Pembangunan Manusia (IPK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, data BPS kabupaten/kota, atau publikasi IPK, dan dokumen pendukung dari Kementerian Keuangan Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menganalisis data dengan mendeskripsikannya tanpa menarik implikasi untuk kelompok tertentu, menurut Sugiyono (2013). Statistik deskriptif menggunakan mean, median, modus, dan dispersi (rentang, varians, dan deviasi standar) untuk mengukur kecenderungan sentral.

Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2018) dalam Kurniadi (2023) menguji model regresi untuk asumsi statistik konvensional termasuk normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi sebelum analisis regresi linier berganda. Regresi digunakan untuk memperkirakan Estimator Linier Tak Bias Terbaik (BLUE). Dengan menggunakan regresi linier multivariat, penelitian ini menguji:

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) dalam Kurniasari et al (2021), Uji normalitas menentukan apakah faktor pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Estimasi regresi yang valid dan tidak bias memerlukan normalitas residual. Karena banyak metode statistik parametrik memerlukan data yang terdistribusi normal, uji normalitas menentukan apakah data penelitian mengikuti pola distribusi normal, menurut Sugiyono (2013). Ini termasuk:

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menentukan apakah variabel independen model regresi berkorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi substansial antar variabel independen, menurut Ghozali (2018) dalam Novri dkk. (2024). Faktor inflasi varians (VIF) lebih besar dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1 menunjukkan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) dalam Paramita dkk. (2021) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas menentukan apakah residual model regresi berbeda antar observasi. Uji Glejser digunakan dalam penelitian ini. Meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen mengidentifikasi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika variabel independen secara signifikan memengaruhi nilai absolut residual. Jika nilai p kurang dari 0,05, heteroskedastisitas ada; jika tidak, heteroskedastisitas tidak ada.

Uji Autokorelasi

Ghozali (2018) dalam Sangur dkk. (2025) menyatakan bahwa dalam Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS, uji autokorelasi menentukan apakah kesalahan pengganggu model regresi berkorelasi. Ia menambahkan bahwa autokorelasi membuat estimasi regresi tidak berharga terlepas dari konsistensinya. Uji Durbin-Watson digunakan dalam penelitian ini. Durbin & Watson (1950) mendeskripsikan uji statistik ini sebagai uji autokorelasi model regresi residual. Autokorelasi orde pertama paling penting. Kriteria Keputusan (Interpretasi DW). Jika $1,5 < DW < 2,5$, tidak ada autokorelasi. $DW \leq 1,5$ menunjukkan autokorelasi positif, sedangkan $DW \geq 2,5$ menunjukkan autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2019) dalam Siswandi dkk. (2015) menyatakan bahwa regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen untuk memprediksi nilai variabel dependen:

IPM (Y) = Indeks Pembangunan Manusia

Pajak Daerah (X_1)

Pendapatan Transfer (X_2)

Persamaan Regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan

Y = IPM Kabupaten/Kota

α = Konstanta (nilai IPM ketika X_1 dan $X_2 = 0$)

β_1 = Koefisien regresi Pajak Daerah

β_2 = Koefisien regresi Pendapatan Transfer

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Pendapatan Transfer

e = Error term (pengaruh variabel lain di luar model)

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t, yang digunakan oleh Sugiyono (2018) dalam Suparlan dkk. (2025), menguji apakah variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen atau apakah hipotesis tentang rata-rata dua kelompok data adalah benar. Nilai yang dihitung dan nilai tabel t dibandingkan dalam uji ini. H_0 ditolak jika nilai p kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen. Dengan nilai p lebih dari 0,05, H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Uji F (simultan)

Menurut Sugiyono (2017) dalam Febrianti, L (2025), uji simultan, atau Uji F, adalah uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi (linier sederhana atau berganda) untuk menilai apakah semua variabel independen memengaruhi variabel dependen. Uji ini mengevaluasi dampak agregat dari semua variabel independen pada perubahan variabel dependen. Bandingkan nilai signifikansi, atau nilai F yang dihitung, dengan nilai tabel F untuk membuat kesimpulan uji F. Model regresi dianggap signifikan dan layak digunakan jika hasil pengujian berada di bawah ambang batas kesalahan ($= 0,05$).

Uji koefisien determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2017) yang dirujuk dalam Isnani dkk. (2024), koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen dan dapat digunakan untuk memilih model regresi. Dalam model regresi, uji R^2 (koefisien determinasi) mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan varians pada variabel dependen. Kualitas kesesuaian model ditunjukkan, tetapi kausalitas dan signifikansi statistik tidak ditunjukkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	60	11783224980	213600000000	69252468637.08	53686207077.605
Pendapatan Transfer	60	648337522906	3489035565562	1367727007207.77	587662628595.153
IPM	60	64.42	81.64	70.9002	4.57646
Valid N (listwise)	60				

Variabel pajak daerah berkisar antara 11.783.224.980 hingga 213.600.000.000. Rata-ratanya adalah 69.252.468.637,08. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) memungut pajak daerah secara berbeda. Deviasi standar yang relatif besar sebesar 53.686.207.077,605 menunjukkan bahwa beberapa daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar daripada daerah lain dalam pengumpulan pajak.

Pendapatan transfer rata-rata sebesar 1.367.727.007.207,77 dan berkisar antara 648.337.522.906 hingga 3.489.035.565.562. Jumlah ini jauh lebih besar daripada rata-rata pajak daerah, menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Alokasi pendapatan transfer daerah bervariasi menurut aturan alokasi fiskal nasional, ukuran populasi, dan luas lahan, dengan deviasi standar sebesar 587.662.628.595,153.

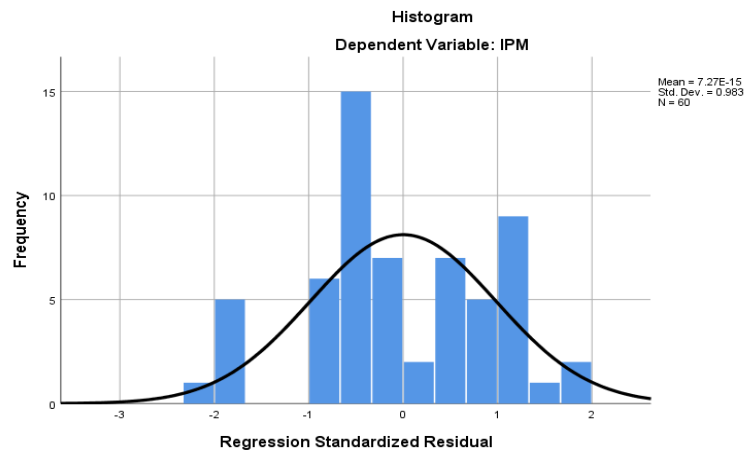
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IMB) berkisar antara 64,42 hingga 81,64, dengan rata-rata 70,90. Rata-rata ini mengklasifikasikan semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tingkat pembangunan manusia menengah hingga tinggi. Pembangunan manusia bervariasi antar kabupaten/kota, meskipun deviasi standar sebesar 4,576 menunjukkan bahwa variasi IMB lebih kecil daripada variasi variabel keuangan daerah.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

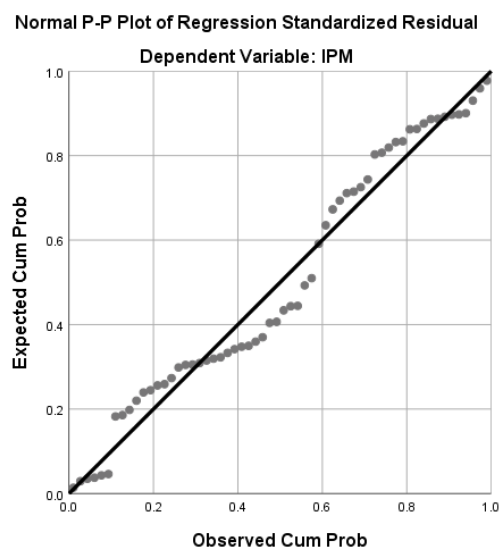
Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.81690225
	Absolute	.107
Most Extreme Differences	Positive	.107
	Negative	-.090
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig.* adalah $0,087 > 0,05$.



Gambar.2 Histogram



Gambar 3. Normal P-Plot

Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal. Titik-titik di sekitar garis adalah data. Histogram dan p-plot menunjukkan data yang terdistribusi secara teratur. Karena data tersebar di dalam garis miring atau histogram, data tersebut mengikuti kemiringannya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	72.715	1.364		53.326	.000	
Pajak Daerah	3.725E-11	.000	.437	3.906	.000	.975
Pendapatan Transfer	-3.213E-12	.000	-.413	-3.688	.001	.975

a. Dependent Variable: IPM

Nilai toleransi 0,975 dan VIF 1,025 untuk kedua variabel independen menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki kesulitan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Test Statistic	Df	p-value	Kesimpulan
LM Statistic	2	0.1769	Homoskedastis ^a (H ₀ diterima, $\alpha=0.05$)

Hasil uji Breusch-Pagan di atas $\alpha=0,05$ (statistik LM 3,4644, nilai p 0,1769) mendukung H₀, menunjukkan varians residual kontinu (homoskedastisitas). Tidak adanya heteroskedastisitas memastikan estimasi koefisien regresi yang konsisten dan efisien untuk inferensi statistik, memenuhi asumsi regresi klasik.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.552 ^a	.304	.280	3.88329	1.637

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Transfer, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: IPM

Residual tidak memiliki autokorelasi positif atau negatif yang signifikan, karena statistik t sebesar 1,637 berada dalam rentang aman 1,5-2,5. Ini menunjukkan bahwa observasi data cross-sectional bersifat independen, sehingga koefisien regresi valid untuk pengujian hipotesis tanpa bias korelasi serial.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Table 6. Analisis Regresi Linear Berganda					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72.715	1.364		53.326	.000
Pajak Daerah	3.725E-11	.000	.437	3.906	.000
Pendapatan Transfer	-3.213E12	.000	-.413	-3.688	.001
a. Dependent Variable: IPM					

a. Dependent Variable: IPM

Temuan dari hasil Uji Regresi Linier Berganda diatas bisa disimpulkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 72,715 + 3,725E-11 - 3,213E12$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa: 1) Konstanta Indeks Pembangunan Manusia (Y) adalah 72,715. Jika Pajak Daerah dan Pendapatan Transfer adalah nol, Indeks Pembangunan Manusia (Y) sama dengan 72,715. 2) Koefisien regresi linier Pajak Daerah adalah 3,725E-11. Dengan demikian, Pajak Daerah akan meningkat sebesar 3,725E-11 jika semua variabel independen lainnya tetap konstan. Pajak Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia berkorelasi positif dengan koefisien positif. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia meningkat seiring dengan Pajak Daerah. 3) Koefisien regresi Pendapatan Transfer adalah -3,213E12. Jika semua variabel independen tetap konstan, Pendapatan Transfer akan turun sebesar -3,213E12. Pendapatan Transfer menurunkan Indeks Pembangunan Manusia dengan koefisien negatif.

Uji Hipotesis / Uji t

Tabel 7. Uji Hipotesis / Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	72.715	1.364		53.326	.000
Pajak Daerah	3.725E-11	.000	.437	3.906	.000
Pendapatan Transfer	-3.213E12	.000	-.413	-3.688	.001

a. Dependent Variable: IPM

Menurut tabel, nilai signifikansi untuk Pajak Daerah adalah $0,000 < 0,05$, dan nilai t yang diestimasi adalah 3,906. Dengan demikian, Pajak Daerah secara signifikan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, variabel Pendapatan Transfer memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t yang dihitung sebesar -3,688. Pendapatan Transfer memiliki pengaruh negatif yang kuat terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji F (Simultan)

Tabel 8. Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	376.139	2	188.070	12.472	.000 ^b
Residual	859.556	57	15.080		
Total	1235.695	59			

a. Dependent Variable: IPM
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Transfer, Pajak Daerah

Menurut analisis, nilai F adalah 12,472 dan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian, Pajak Daerah dan Pendapatan Transfer secara signifikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.552 ^a	.304	.280	3.88329

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Transfer, Pajak Daerah

Berdasarkan analisis koefisien determinasi diatas, nilai koefisien determinasinya sebesar 0,304. Ini meAnalisis koefisien determinasi di atas menghasilkan 0,304. Variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 30,4%, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti memengaruhi sisanya sebesar 69,6%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Koefisien regresi positif berarti pendapatan pajak daerah meningkatkan HDI, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Kekuatan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan manusia meningkat seiring dengan kemampuannya untuk memungut pajak daerah.

Pajak daerah menghasilkan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan kemandirian anggaran. Pajak daerah yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk: 1) Meningkatkan pendidikan (fasilitas, guru, dan akses), 2) Meningkatkan kesehatan (fasilitas, tenaga medis, dan layanan pencegahan), 3) Meningkatkan infrastruktur air, sanitasi, dan transportasi, dan 4) Mendukung inisiatif sosial kesejahteraan masyarakat. HDI bergantung pada kesehatan, pendidikan, dan tingkat kehidupan yang layak. Dengan demikian, kenaikan pajak daerah meningkatkan HDI secara langsung dan tidak langsung.

Analisis ini menegaskan temuan Saragih (2018), yang menemukan bahwa peningkatan PAD meningkatkan HDI karena daerah memiliki kebebasan fiskal untuk menetapkan prioritas pembangunan. Pajak daerah meningkatkan HDI kabupaten/kota di Indonesia, menurut Putri dan Nurkholis (2020). Oleh karena itu, penelitian ini mendukung gagasan bahwa pajak daerah mendorong pembangunan manusia di tingkat daerah.

Pengaruh Pendapatan Transfer Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Koefisien negatif menunjukkan bahwa pendapatan transfer meningkatkan HDI yang lebih rendah, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi suatu wilayah pada pendanaan transfer pemerintah pusat tidak selalu meningkatkan pembangunan manusia.

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berupaya untuk mengurangi ketidakseimbangan anggaran daerah. Namun, administrasi daerah dan prioritas pengeluaran sangat memengaruhi bagaimana dana transfer memengaruhi HDI.

Beberapa variabel menjelaskan hasil yang tidak menguntungkan ini: 1) Ketergantungan fiskal menghambat daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal; 2) Penggunaan dana transfer yang tidak produktif, seperti mengalokasikan lebih banyak untuk personel daripada pembangunan; 3) Efisiensi dan efektivitas manajemen anggaran yang rendah, yang mencegah dana yang besar untuk sepenuhnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat; dan 4) Masalah tata kelola dan akuntabilitas, yang mencegah dana didistribusikan secara optimal ke sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Sasana (2015) menemukan bahwa menyeimbangkan dana tanpa tata kelola yang efektif tidak selalu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Suparlan dan Dewi Rispawati menemukan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak secara signifikan menurunkan HDI di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Bagi Hasil Daerah (DBH) belum cukup bermanfaat bagi sektor pembangunan manusia.

PENUTUP

Simpulan

Studi dan diskusi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah secara signifikan meningkatkan HDI kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pendapatan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah mendanai layanan publik berkualitas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Pendapatan transfer secara signifikan menurunkan HDI. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah yang signifikan pada dana transfer pemerintah pusat mungkin tidak membantu pembangunan manusia karena alokasi anggaran dan administrasi dana transfer yang tidak efisien.

3. Pajak dan transfer daerah memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah sangat penting bagi pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Koefisien determinasi sebesar 30,4% menunjukkan bahwa variabel pendapatan pajak dan transfer daerah tidak sepenuhnya menjelaskan variasi HDI, oleh karena itu faktor tambahan memengaruhi pembangunan manusia di luar model.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan manajemen anggaran untuk mengarahkan lebih banyak pengeluaran publik ke sektor-sektor yang berdampak pada HDI seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
2. Pemerintah pusat harus meninjau distribusi dan penggunaan dana transfer untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan mendorong pembangunan manusia, bukan hanya pengeluaran rutin daerah.
3. Peneliti di masa mendatang harus mempertimbangkan kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pendidikan dan kesehatan, serta kualitas pemerintahan sebagai variabel HDI.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti Lita. (2025). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Universitas Teknologi Sumbawa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Fernandes Joni & Putra, M. L. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA 19 KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP: Menara Ekonomi.
- Fretes, N., P. (2017). *Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen*. Papua: Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri.
- Herdian, M., S., Salomo, R. V., & Bakrie, M. R. (2025). *Impact of Fiscal Transfers and Local Revenue Accountability on Community Welfare in Indonesia*. Universitas Indonesia : Riset & Jurnal Akuntansi.
- Isnani, M. H., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA NTB TAHUN 2018-2022*. Universitas Mataram: Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business.
- Kurniadi, T. (2023). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat*. Pontianak: Prosiding Seminar Nasional Tahunan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.
- Kurniasari, R., Kurnia. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Surabaya: Jurnal Ilmuan Riset Akuntansi.
- Novri, E., Joko, R., Intan., Syaila, F., & Siregar, A. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara Tahun 2004 - 2022*. Universitas Negeri Medan: Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia.
- Paramita, D., W, R., Rizal, N & Sulistyan., B., R. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Lumajang: Widya Gama Press.
- Sangur, K., Louhenapessy, J., D., Sangur, L., D & Siregar, I. (2025). *THE IMPACT OF INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFERS ON QUALITY OF HUMAN RESOURCES*. Universitas Pattimura: Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan.
- Siswandi & Pituringsih, E. (2015). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD DAN DANA*

PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI BELANJA MODAL. Universitas Mataram: ASSETS.

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suparlan & Rispawati Dewi. (2025). *Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Produk Domestik Bruto terhadap Indek Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara barat*. Universitas Mataram: Jurnal Cendekia Ilmiah.

Suparlan & Rispawati Dewi. (2025). *ANALISIS PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK, DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMDA LAINNYA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN IPM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*. Universitas Gunung Rinjani: Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah.

Suhyanto, O., Fauzi, A, J., & Rustidai, E. (2017). *PENGARUH DANA TRANSFER DANA DESA DAN PAD TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA BARAT*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Keuangan.

Tandean, A., V & Nurmansyah, F. (2024). *Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Otonomi Khusus*. Jakarta: Jurnal Budget.